

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam guna memakmurkan dan mengentaskan negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Masih amat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan kemiskinan di Indonesia semakin kompleks setiap tahunnya.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM yang kemudian selisih subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat miskin (Selviana, 2016).

Masalah kemiskinan telah menjadi suatu hal yang kompleks sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah suatu keadaan tidak berharta, berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari

Kemiskinan sudah menjadi hal yang biasa bagi banyak negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, tak terkecuali Kabupaten Wonogiri. Menurut BPS, saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri per 13 Juni 2016 adalah sebanyak 124.830 ribu jiwa. Dengan persentase sebesar 13,12%. Wonogiri sendiri memiliki indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,68% dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,38%. Mengetahui hal tersebut, sudah selayaknya pemerintah melakukan upaya untuk segera menanggulangi kemiskinan yang semakin kompleks (Publikasi BPS Wonogiri, “Wonogiri Dalam Angka”. 2017). Berikut ini adalah tabel data jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan jumlah rumah tangga dan jumlah individu:

Tabel 1-1. Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan jumlah rumah tangga dan jumlah individu

Nama Kecamatan	Kode Wilayah	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
PRACIMANTORO	3312010	8153	26210
PARANGGUPITO	3312020	2767	8303
GIRITONTRO	3312030	3080	9434
GIRIWOYO	3312040	4774	14513
BATUWARNO	3312050	1853	5274
KARANGTENGAH	3312060	1398	4232
TIRTOMOYO	3312070	5351	17622
NGUNTORONADI	3312080	2863	8743
BATURETNO	3312090	4198	12467
EROMOKO	3312100	4674	13814
WURYANTORO	3312110	2866	8445
MANYARAN	3312120	4763	13773
SELOGIRI	3312130	3272	10965
WONOGIRI	3312140	3785	13019
NGADIROJO	3312150	4000	14680
SIDOHARJO	3312160	3372	12702
JATIROTO	3312170	3108	10996
KISMANTORO	3312180	5358	18894
PURWANTORO	3312190	5883	19553
BULUKERTO	3312200	2431	8669
PUHPELEM	3312201	2103	6728
SLOGOHIMO	3312210	4364	15223
JATISRONO	3312220	3159	11045
JATIPURNO	3312230	2339	8990
GIRIMARTO	3312240	3422	12872
	TOTAL :	93336	307166

Sumber : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin,
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2017

Kemiskinan dapat ditanggulangi dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, (ii) peningkatan akses pelayanan dasar, (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. (Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, 2011)

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Pemerintah selaku pembuat keputusan berupaya meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan. Lewat bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan sebuah program penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan Program Keluarga

Harapan (PKH). Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menentukan bahwa:

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”

Kemudian pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan BBM. Kebijakan pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) digolongkan dalam klaster-1 bersama program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat dengan nama Askeskin untuk perawatan kesehatan gratis, program beasiswa untuk siswa miskin, serta program bantuan untuk kelompok yang rentan sosial lainnya. Serta program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga miskin (program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM) dengan menyorot pada pemberdayaan kelompok masyarakat dan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil berupa pemberian modal dalam bentuk kredit usaha rakyat (Haryanti, 2015).

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin tajam pada tahun 2008 memaksa pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada bulan Juni tahun 2008. Bersamaan dengan itu pula pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 (Inpres 3/2008) tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan

Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program BLT ini memberikan Rp100.000,- per bulan dimulai pada bulan Juni berakhir di bulan Desember tahun 2008, selama tujuh bulan (Iqbal, 2008).

Sebelumnya pada tahun 2005 – 2006, Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005. Program pemberian BLT tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program ini bersifat temporer, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong menguatnya *the culture of poverty* (Iqbal, 2008).

Dana Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya akan disebut dengan BLT) termasuk dalam kategori Bantuan Tunai tak bersyarat yang diterbitkan pemerintah pada Tahun 2008 dan hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak kenaikan BBM. Pemerintah mendasarkan hal ini dalam membuat kebijakan BLT yang berguna untuk membantu masyarakat miskin ataupun masyarakat yang berada pada kelompok kedua yang sudah pasti juga akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Selain itu, BLT juga berlaku sebagai kompensasi pemotongan subsidi BBM kepada RTS. Subsidi BBM yang pada tahun 2008 telah dicabut oleh pemerintah dinilai dapat menambah jumlah APBN dan

terjadi defisit kas negara. Oleh karena itu BLT ini dicanangkan sebagai sebuah kompensasi bagi penduduk miskin.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Program BLT tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005 – 2006. BLT disalurkan kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterimakan per triwulan sebesar Rp 300.000,-.

Tabel 1-2. Perbedaan BLT 2005 dan BLT 2008

No.	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
1	Dasar Peraturan	Inpres No.12 Tahun 2005	Inpres No. 3 Tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 Bulan	7 Bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,- /periode	Rp 300.000 ,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber: Jurnal Teknis Pelaksanaan BLT, 2008.

Beberapa permasalahan terjadi dalam penyaluran BLT. Dari segi penyaluran, banyak terjadi kericuhan dalam pembagian dana. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda untuk berteduh yang kurang, yang mengakibatkan tidak tertampungnya beberapa penerima BLT,. Terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri. Lokasi pembayaran terpusat di ibukota kecamatan, hal ini

menyulitkan masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga terpaksa keluar ongkos untuk biaya transportasi, mekanisme penyaluran yang belum terbuka sehingga masih sering terjadi permasalahan seperti kesalahan criteria penerima bantuan sehingga sering kali program ini tidak tepat sasaran (Iqbal, 2008).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka perlu untuk diketahui bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Wonogiri pada khususnya, perlu dianalisis dengan menyoroti proses mekanisme dalam implementasi tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menentukan prioritas penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, BLT menghadapi beberapa masalah dalam penyalurannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana menganalisis penyaluran bantuan langsung tunai dengan menggunakan metode AHP.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaannya, penyaluran Bantuan Langsung Tunai menghadapi banyak masalah diantaranya penyaluran yang tidak tepat sasaran kepada para penduduk miskin, sehingga permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana menganalisis penyaluran Bantuan Langsung Tunai dengan mempertimbangkan variabel indikator kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wonogiri menurut

persepsi masyarakat Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan analisis AHP.

C. TUJUAN PENELITIAN

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Wonogiri dengan metode AHP dan mengetahui kriteria penduduk miskin seperti apa yang pantas dan lebih tepat untuk diberikan prioritas bantuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai referensi kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi kemiskinan

b. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi yang hendak melakukan penelitian mengenai Analisis Program BLT.

E. METODE PENELITIAN

E.1. Alat dan Model Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kualitatif dalam meneliti masalah yang disajikan. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian Analisis Hirarki Proses yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.

E.2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, penulis menggunakan jenis data primer yang didapatkan melalui kuesioner AHP terhadap responden di Kabupaten Wonogiri yang didapatkan dengan metode sampling. Data primer akan didukung dengan data sekunder yang berasal dari dinas/instansi terkait.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika Penulisan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Isi dari pendahuluan antara lain, Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA
Bab II berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang telah dilakukan penulis. |
| BAB III | METODE PENELITIAN
Dalam bab III ini, peneliti membahas tentang apa saja ruang lingkup penelitian, seperti definisi variabel pada dataduan sumber data. |
| BAB IV | HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab IV berisi tentang objek penelitian yang telah dilakukan, analisis data, dan tentu saja pembahasan penelitian |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN
Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian yang telah dilakukan. |